

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sekolah merupakan lembaga formal yang memiliki fungsi untuk tempat sebagai menuntut ilmu yang di harapkan mampu berjuang dan bersaing di tingkat regional maupun di tingkat internasional. Pelaksanaan yang ada pada sekolahan di haruskan untuk menyama ratakan dan juga meningkatkan mutu dari pendidikan yang pada saat ini tengah berkembang bagi warga negara Indonesia sehingga mampu menjadi manusia yang cerdas dan produktif. Usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan bisa diawali dengan peningkatan kualitas proses belajar mengajar yang berada di semua jenjang pendidikan, hal ini perlu di lakukan karena proses belajar mengajar merupakan inti dari kegiatan yang berada di lembaga formal ini. kualitas dari pendidikan juga akan lebih baik lagi jika masukan (*input*) sumber daya manusia yaitu peserta didik dapat di kelola dengan baik sehingga akan menghasilkan keluaran (*output*) yang berkualitas

Pentingnya sebuah manajemen pendidikan nasional di karenakan adanya pendidikan merupakan kebutuhan yang mendasar bagi manusia Indonesia. Bukan hanya itu saja melainkan juga sebagai dinamisator adanya sebuah pembangunan. Oleh sebab itu manajemen sebuah subsistem dari sistem pembangunan nasional (Tilaar, 1992:3-4).

Adanya manajemen dalam proses penentuan dari tujuan ataupun sasaran yang ingin di capai dan menentukan sumber yang di gunakan untuk mencapai tujuan yang

efisien dan juga efektif. Jika kita kaitkan dengan adanya pendidikan, adanya respon atau pengaruh hal tersebut tentunya ada campur tangan dari pihak sekolah untuk memperbaiki kinerjanya tersebut terkhusus dalam hal menyusun dan juga melaksanakan adanya manajemen pengorganisasian pendidikan yang memiliki peran besar dalam suksesnya pendidikan. Dengan adanya kualitas dan bermutunya penyusunan dan pelaksanaan pendidikan dapat menyukseskan sebuah instansi (Sagala, 2001:99).

Manajemen sekolah inklusi merupakan kewenangan penuh dari kepala sekolah dalam melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengevaluasian, dan juga mengawasi pada komponen pendidikan sekolah tersebut yang meliputi siswa, tenaga pendidik, kurikulum, sarana dan prasarana, pembiayaan dan hubungan terhadap masyarakat sekitar (Satori.dkk, 2010:25).

Pendidikan merupakan komponen yang paling penting dalam membangun sumber daya manusia dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Indonesia sendiri memiliki berbagai macam jenjang pendidikan yang di terapkan, di antaranya yaitu dasar, menengah dan juga perguruan tinggi. Pada setiap jenjangnya memiliki kurikulum yang di sesuaikan dengan setiap usia dan juga perkembangan pedagogisnya. Hal ini di lakukan agar peserta didik agar memiliki kompetensi yang bisa bersaing di masyarakat. Selain itu penyusunan kurikulum juga memiliki tujuan dengan dasar perkembangan psikologis peserta didik agar pada setiap proses pendidikan dapat di lakukan secara efektif, optimal, dan juga efisien. Terkait hal ini juga di dukung oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang sama. Maka yang harus di lakukan pemerintah

adalah memfasilitasi layanan pendidikan yang terbaik bagi semua warga negara agar bisa mencerdaskan para peserta didiknya.

Menurut Undang-Undang Sisdiknas No. 20 tahun 2003 Bab 1 Pasal 1, peserta didik merupakan anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya melalui jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Hal ini dapat di artikan jika peserta didik adalah siapa saja yang tidak memandang status sosial yang ada dan juga fisik dari seseorang yang ingin mengembangkan potensi yang ada pada dirinya.

Setiap anak juga berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Pendidikan yang layak di sini mencakup mutu pendidikan yang baik serta pelayanan yang ramah terhadap anak. Sarana dan prasarana juga harus di kembangkan dalam menunjang kebutuhan penunjang dari peserta didik itu sendiri. Selain itu tenaga kependidikan juga harus memiliki kompetensi yang berkualitas untuk bisa mengajar para peserta didik.. Anak yang termasuk ke dalam kategori berkebutuhan khusus yaitu tunanetra, tunarungu, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, gangguan perilaku, anak berbakat, anak dengan gangguan kesehatan. Setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama guna mendapatkan sebuah pendidikan yang bermutu termasuk anak bekebutuhan khusus (ABK), hal ini tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab IV pasal 5 ayat 1.

Penyelenggaraan pendidikan inklusif merupakan bagian dari program yang dicanangkan oleh beberapa negara di dunia terkait dengan Education For All (EFA). Pernyataan Salamanca (1994) dan Kerangka Aksi Dakar (1997) Paragraf 4 menyatakan bahwa "*Inclusive education seeks to addres the leraning needs of all*

children, youth and adults with a specific focus on those who are vulnerable to marginalisation and exclusion” (UNESCO: 2006). Pernyataan ini jelas memberikan gagasan tentang pentingnya membangun kesadaran kepada anak berkebutuhan khusus melalui pendidikan inklusif yang berupaya memperjuangkan hak-hak mereka agar tidak selalu termarginalkan dalam lingkungan yang mereka tempati.

Sebelum di adakannya konsep pendidikan inklusi anak berkebutuhan khusus atau ABK di sekolahkan di sekolah luar biasa (SLB). Hal ini berakibat terhadap terasingkannya anak berkebutuhan khusus (ABK) ketika berada di lingkungan masyarakat. Masyarakat juga memandang jika anak berkebutuhan khusus (ABK) sebagai sebuah keanehan ketika seorang difabel berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan. Kurangnya pemahaman yang ada pada diri masyarakat yang ada pada anak berkebutuhan khusus (ABK) yang bersikap tidak peduli menyebabkan psikologi dari penyandang disabilitas itu sendiri menjadi tertekan karena hal itu. Kondisi ini lah yang membuat pemerintah untuk memberikan perhatian khusus kepada anak berkebutuhan khusus (ABK) agar mendapat perlakuan yang sama seperti anak pada umumnya.

Oleh karena itu, adanya penetapan yang menyebutkan wajib belajar selama sembilan tahun yang tertuang UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 Pasal 32 tentang pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus. Hal ini diimplementasikan melalui Permendiknas nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa yaitu dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus untuk mengikuti pendidikan di sekolah reguler (Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas/ Kejuruan) yang ada di lingkungan sekitar.

Pelaksanaan yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia sudah menunjukkan perhatian khusus terhadap anak yang berkebutuhan khusus (ABK). Pemerintah telah memberikan instruksi kepada beberapa sekolah dasar di kota-kota besar agar melaksanakan pendidikan inklusif ini. Pendidikan Inklusi yaitu menggabungkan antara siswa normal dan anak berkebutuhan khusus (ABK) ke dalam satu kelas reguler. Pendidikan yang dilakukan ini tentunya memiliki tujuan untuk menunjang kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus dan normal agar bisa saling melengkapi.

Terselenggara pendidikan inklusi ini tentunya harus terdapat manajemen bagi siswa. Menurut Knezevich (Imron, 2011: 6) manajemen peserta didik atau *pupil personnel administration* merupakan suatu layanan yang memiliki pusat perhatian terhadap pengaturan, pengawasan, dan juga layanan peserta didik di dalam kelas maupun di luar kelas yang meliputi : pengenalan, pendaftaran, layanan individu seperti pengembangan kemampuan minat sampai kebutuhan peserta didik bisa matang di sekolah. Idealnya manajemen peserta didik di sekolah inklusif harus siap untuk mengelola peserta didik yang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda tanpa terkecuali dan mampu memberikan pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan peserta didik

Tahun 2014 SLB yang ada di Indonesia ini tercatat hingga 1774 sekolah dan yang menerapkan adanya pendidikan inklusi ini sebanyak 2430 sekolah. sekolah dengan model seperti itu sering kita jumpai pada tingkat kabupaten dan kota saja, dan 200 kabupaten terindikasi masih belum memiliki SLB. Oleh sebab itu Direktorat Pendidikan dasar melalui direktur pendidikan khusus dan layanan khusus (PKLK) sudah berupaya untuk meningkatkan fasilitas pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus

Adanya Pendidikan inklusi ini tentunya masih baru, dengan usia yang masih dalam tahap perkembangan maka terdapat keuntungan dan hambatan dalam mengelola sekolah. Berdasarkan data penyandang disabilitas dari Dinas pendidikan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan bahwa masih ada sekitar 1500 anak penyandang disabilitas usia sekolah yang masih belum mendapatkan kesempatan pendidikan formal. Sistem pendidikan bagi penyandang disabilitas di Indonesia masih menghadapi banyak masalah. Diantaranya adalah karena tidak semua sekolah mampu menerima siswa penyandang disabilitas dan masih belum ada pemahaman yang sama tentang konsep pendidikan inklusi baik dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan para penyandang disabilitas atau orang tua penyandang disabilitas

Dikembangkannya sekolah yang innklusi tentunya harus sesuai dengan sarana dan juga prasarana yang ada, dan tentunya harus di siapkan semaksimal mungkin bagi anak berkebutuhan khusus,. Terdapat berbagai jenis anak berkebutuhan khusus (ABK) yang masuk ke dalam sekolah inklusi. Penyesuaian layanan pendidikan untuk setiap anak berkebutuhan khusus (ABK) memiliki akibat terhadap bekerja kerasnya sekolah dalam memenuhi layanan tersebut. Penyesuaian yang sering di lakukan adalah mendatangkan guru pembimbing khusus dari sekolah luar biasa (SLB). Dalam sekolah inklusif, manajemen pengelolaan peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus di bantu oleh minimal satu orang guru pembimbing khusus (GPK). Oleh sebab itu banyak sekolah inklusi yang bekerja sama dengan sekolah luar biasa (SLB).

Peneliti mengambil lokasi penelitian pada tingkat Sekolah Dasar (SD) di karenakan di tempat inilah seorang guru membentuk karakter dan kepribadian siswa mulai di sertai katar belakang pendidikan keluarga yang berbeda sehingga apa yang di ajarkan bisa menjadi sarana untuk bisa mendapatkan ilmu dan juga pengetahuan.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pendataan pada tahun 2015 dimana terdapat 19 Sekolah Luar Biasa (SLB) yang ada di kabupaten Bantul ini dan juga terdapat 178 sekolah umum yang di dalamnya terdapat anak berkebutuhan khusus dengan kebutuhan yang berbeda-beda pada setiap kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pemilihan ketiga SD ini bukan tanpa alasan. SD 1 Trirenggo merupakan salah satu sekolah yang memiliki jumlah siswa yang berkebutuhan khusus lebih banyak daripada sekolah pada umumnya. SD 1 Trirenggo ini juga di tunjuk oleh Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul sebagai sekolah inklusif percontohan sehingga menarik untuk di teliti karena merupakan sekolah inklusi yang telah lama berdiri. Dan untuk SD N Karanganyar sekolah inklusi yang di awali oleh seorang guru mengaji yang terketuk untuk mendidik anak yang memiliki kekurangan sehingga bisa mendapatkan persamaan perlakuan dalam proses belajar mengajar dengan anak yang normal bahkan awalnya dulu merupakan sekolah dasar INPRES (Instruksi Presiden). Dan juga SD Muhammadiyah Notoprajan yang terkadang hanya di anggap sekolah kecil namun memiliki tingkat kemauan yang besar dalam mengelola pendidikan inklusi ini.

Berdasarkan uraian yang ada menarik untuk di adakannya sebuah penelitian yang memiliki judul “Evaluasi program pendidikan sekolah dasar inklusi di Yogyakarta” yang meliputi SD N Karanganyar, SD Muhammadiyah Notoprajan, dan SD N 1 Trirenggo Bantul.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sejarah program pendidikan sekolah dasar inklusi di Yogyakarta?
2. Bagaimana input program pendidikan sekolah dasar inklusi di Yogyakarta?
3. Bagaimana proses program pendidikan sekolah dasar di Yogyakarta?
4. Bagaimana keberhasilan dari program pendidikan sekolah dasar di Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui sejarah program pendidikan sekolah dasar inklusi di Yogyakarta
2. Untuk menganalisis input program pendidikan sekolah dasar inklusi di Yogyakarta
3. Untuk mengkaji proses program pendidikan inklusi sekolah dasar di Yogyakarta
4. Untuk mengidentifikasi keberhasilan dari program pendidikan sekolah dasar inklusi di Yogyakarta

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat yang positif di antaranya:

1. Manfaat Teoretis

Bagi Prodi PAI UMY sebagai penambah referensi pustaka dalam membuat karya ilmiah berbasis metodologi pembelajaran dan evaluasi pembelajaran.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Sekolah

Hasil ini di harapkan bisa menjadi bahan evaluasi sekolah agar bisa semakin meningkatkan mutu dan juga kualitas dari guru maupun dari siswa.

b. Bagi Guru

Hasil penelitian ini di harapkan bisa membuat guru semakin paham dan mengetahui tentang pentingnya sebuah pendidikan bagi semua siswa baik yang memiliki kebutuhan khusus ataupun normal.

c. Bagi Siswa

Siswa sebagai peserta didik diharapkan dapat untuk lebih tekun dalam mengoptimalkan kualitas prestasi belajarnya.